

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.¹ Kesehatan bisa dikatakan sebuah kondisi atau pencapaian yang sangat di idamkan oleh makhluk hidup, khususnya pribadi manusia. Karena kondisi fisik seseorang dengan individu yang lainnya tidak selalu sama, kesehatan setiap orang juga akan berbeda, hewan sebagai makhluk hidup juga memerlukan suatu kondisi yang sehat. Tidak menutup kemungkinan hewan juga bisa terkena penyakit layaknya yang terjadi pada manusia.²

Salah satu komponen yang diharapkan adalah Kesehatan merupakan hal yang cukup penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup berakal maupun tidak berakal, namun kesehatan sering dihiraukan. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal paling baik dibanding makhluk hidup lainnya. Kesehatan yang baik tidak selamanya dapat dialami makhluk hidup, namun pada kehidupan nyata manusia sering melupakan bahwa kesehatan penting untuk pertahankan. Kecenderungan manusia menyadari kesehatan itu penting umumnya saat gangguan kesehatan mulai menyerang. Pentingnya kesehatan makhluk hidup tidak hanya dialami oleh manusia. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan. Keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat, Menyebabkan perlunya perhatian khusus manusia dan hewan hidup dalam satu lingkungan.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 41 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009*, dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014 ,pasal 1 ayat 2.

²Wery Indrawan, “Keragaman Memelihara Kesehatan Hewan Ternak”, *jurnal online mahasiswa*, vol. 2, Arsitektur Universitas Tanjungpura, rumah sakit hewan di kota pontianak, 2014, h. 23.

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 1 menjelaskan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengelolaan, Pemasaran, Pengusaha, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana.⁴

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.⁵ Masalah ini yang sering dihiraukan masyarakat akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh kesehatan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sedangkan pada saat ini banyak bermunculan berbagai gangguan kesehatan hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia, maupun gangguan kesehatan hewan yang dipengaruhi oleh manusia, sehingga penting untuk menjaga kesehatan hewan yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan bantuan jasa medik kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk diketahui terutama pada masyarakat umum yang secara spesifik belum memahami secara jelas tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian

³Republik Indonesia, *Undang-Undang 41 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014.*

⁴Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 41 Tahun 2014, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014. Pasal 1ayat 1.*

⁵Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 41 Tahun 2014, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014. Pasal 1ayat 38.*

tetapi penanggulangan terhadap hewan ternak yang terserang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan hewan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah pusat maupun daerah perlu mengambil kebijakan diantaranya adalah optimalisasi fungsi peternakan, perlu mengambil kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan.

Undang-Undang No 41 tahun 2014 mengenai peternakan dan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu para aparat atau Dinas Peternakan dalam hal ini memiliki wewenang dalam menertibkan segala peraturan yang awalnya tidak memiliki kekuatan hukum membuat Dinas Peternakan sulit dalam melaksanakan tugasnya, akibat para peternak belum memahami aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka dari itu Dinas peternakan melaksanakan aturan yang telah ada. Adanya peraturan bisa merealisasi peternakan lebih baik dan memberikan jaminan kesehatan hewan ternak sesuai dengan undang-undang.

Persepsi peternakan terhadap bantuan sapi potong dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar skripsi oleh Febrindah Gunawan. Skripsi ini lebih berfokus pada bantuan sapi potong yang ada di Kabupaten Takalar yang merupakan salah satu ternak yang dapat diandalkan sebagai penyedia daging. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi peternak apabila bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik.⁸

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, yang dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor lain non-hukum. Dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang dapat menunjang penyusun dalam melakukan penelitian di Dinas Peternakan Kabupaten Bone.

⁸Febrindah Gunawan, "Persepsi Peternakan Terhadap Bantuan Sapi Potong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar", (*Skripsi program Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014*), h. 10.

Fokus kajian yang saya angkat tentang kesehatan hewan terutama produk hewani konsumsi untuk masyarakat yang ada di pasar dan di RPH. Skripsi yang ditulis oleh Febrindah Gunawan berbeda dengan kajian yang saya angkat dalam penulisan ini. Dengan kajian ini masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih daging konsumsi yang sehat, segar, utuh, dan halal. Hewan ternak yang hendak di pasarkan harus dipotong di rumah potong hewan, karena daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat harus aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Kajian ini penting untuk dikembangkan dan diketahui oleh masyarakat agar mereka lebih memahami bahwa kesehatan hewan dan manusia perlu untuk dijaga, agar terciptanya masyarakat yang sehat dan terbebas dari penyakit menular akibat hewan sakit yang dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan hewan maupun manusia..

Berdasarkan realita tersebut penulis tertarik meneliti problem yang ada dengan mengambil judul "peran Dinas Peternakan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di pasar Palakka berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Peternakan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan yang ada di pasar Palakka?
2. Bagaimana hambatan Dinas Peternakan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan yang ada di pasar Palakka?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang

dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda pada judul tersebut adapun penjelasannya sebagai berikut.⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah separangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.¹¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah.¹² Menurut kamus kesehatan Indonesia Arab kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera dan bukan hanya ketiadaan penyakit¹³ menurut kamus kesehatan Indonesia Arab hewan atau daging adalah merupakan semua jaringan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya¹⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli.¹⁵

⁹ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiri*, Ed II, (Cet.II, Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), h.32.

¹⁰W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984), h. 735.

¹¹Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (ALFABETA, Jakarta, 2010), h. 166.

¹²Setiwan, "pengawasan", <http://typoonline.com/kbbi>, di akses pada 13/Januari/2021.

¹³Rika Astari dan Winda Triana, *kamus kesehatan Indonesia Arab*, (cet Pertama, Trussmedia grafika, 2018), h .214.

¹⁴Rika Astari dan Winda Triana, *kamus kesehatan Indonesia Arab*, (cet Pertama, Trussmedia grafika, 2018), h.161.

¹⁵Farhan, "Pasar", <http://kbbi.kata.web.id>, diakses pada 14/Januari/2021.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dalam Dinas Peternakan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di pasar Palakka berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja dalam Dinas Peternakan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan khususnya daging di pasar Palakka berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai gagasan tentang pengembangan dan supremasi pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan khususnya daging. Di Kabupaten Bone Sebagai bahan bacaan (literatur) bagi praktisi hukum tata negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai perbandingan terhadap beberapa informasi tentang pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan khususnya daging.
3. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat yang bergelut dalam studi-studi keislaman dan para praktisi hukum.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Samal yang berjudul “Analisa Manajemen Kesehatan Terhadap Produktivitas Ternak Sapi Potong Di PT. Berdikari United

Livestock (Blus) Kabupaten Sidrap”. Menunjukkan masalah kesehatan yang sering terjadi pada sapi yang dipelihara oleh perusahaan.¹⁶ Dalam skripsi ini berfokus pada kesehatan manajemen produktivitas ternak sapi potong. Skripsi ini lebih membahas bagaimana produktivitas ternak sapi potong yang ada pada perusahaan bagaimana perusahaan memenejemen kesehatan pada ternak potong.

Skripsi yang ditulis oleh Febrindah Gunawan yang berjudul “Perspektif Terhadap Bantuan Sapi Potong dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar”. sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil daging di indonesia.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Febrindah Gunawan lebih berfokus pada bantuan sapi potong dari Dinas Peternakan dan kesehatan hewan yang memberikan bibit-bibit yang unggul pada masyarakat di Kabupaten Takalar.

Skripsi yang ditulis oleh Ewan Setiawan yang berjudul “Peranan Upt Peternakan dalam Perkembangan Peternakan Rakyat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. sangat berperan penting dalam mengembangkan peternakan rakyat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.¹⁸ Skripsi ini lebih membahas bagaimana perkembangan peternakan rakyat yang ada di desa Soro Kacamatan Lambu Kabupaten Bima dan bagaimana peran peranan Upt peternakan dalam mengembangkan peternakan rakyat.

Skripsi di atas hampir sama dengan titik pembahasan yang ingin dikaji oleh peneliti. Penulis disini akan membahas mengenai “Peran Dinas Peternakan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan khususnya daging

¹⁶Fitri Samal, “Analisis Manajemen Kesehatan Terhadap Produktivitas Ternak Sapi Potong Di PT. Berdikari United Livestock (Blus) Kabupaten Sidrap”, (*Skripsi Program Sarjana, UIN Alauddin Makassar*, 2015), h. 51.

¹⁷Febrindah Gunawan, “Persepsi Peternakan Terhadap Bantuan Sapi Potong dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar”, (*Skripsi Program Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014), h.22.

¹⁸Ewan Setiawan, “Peranan Upt Peternakan dalam Perkembangan Peternakan Rakyat di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”, (*Skripsi Program Sarjana, UIN Alaudding Makassar*, 2018), h.19.

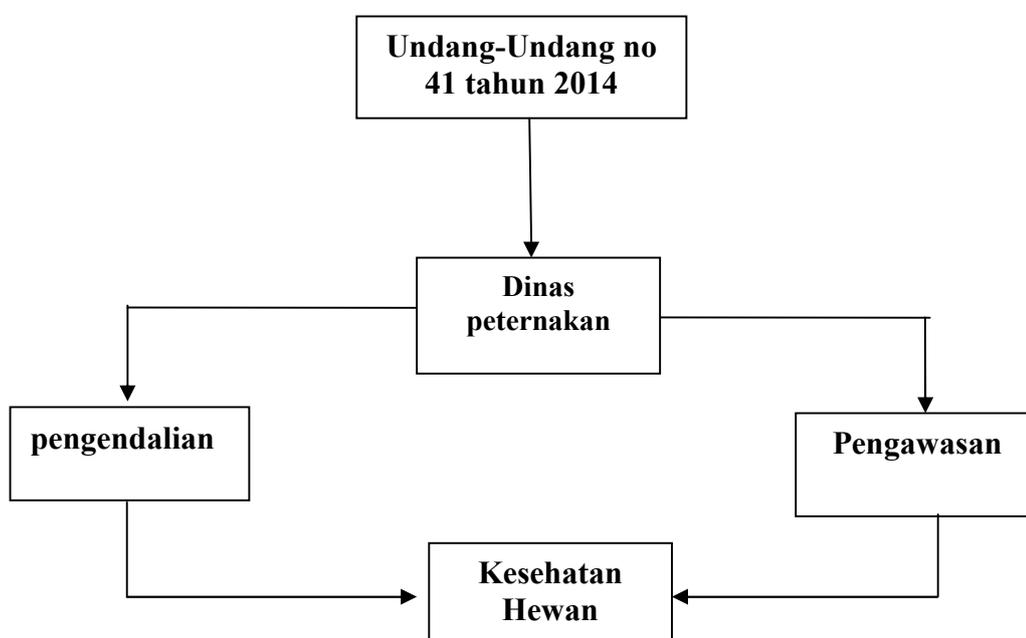
di pasar Palakka berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Skripsi yang saya angkat lebih berfokus pada bagaimana peran Dinas Peternakan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan terhadap daging konsumsi yang ada di pasar dan RPH. Dan memberikan jaminan bahwa daging konsumsi yang ada di pasar dan RPH itu terjamin kehalalannya dan terbebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan ternak lainnya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian rencana kerja seorang penulis. Selain itu kerangka pikir juga memiliki kegunaan untuk membantu penulis menyusun secara teratur, membantu penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda, menghindari penulis dalam penguraian topic secara berulang-ulang dan memudahkan penulis untuk mencari materi pembantuan.¹⁹

Gambar pola/skema



¹⁹.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.I (Cet 8; Jakarta: Sinar Grafika,2016), h.193.

Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji Peran Dinas Peternakan Dalam Pengendalian dan pengawasan Terhadap Kesehatan Hewan dipasar Palakka Berdasarkan undang-undang no 41 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. kemudian penulis akan mengumpulkan data-data dari masyarakat tentang masalah serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone dan mencoba memecahkan masalah dengan mencari solusi atau problem solving, dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bone Tepatnya pasar Palakka sehingga mendapatkan hasil dari penelitian yang dimaksud.

Dinas Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Pelaksanaan merupakan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan. Pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuaidengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, yaitu bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai standar. Pasar hewan sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah guna memberikan jaminan keamanan pangan produk hasil ternak yang akan di pasarkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yang langsung berkomunikasi dan mencari informasi kepada Dinas Peternakan Kabupaten Bone maupun masyarakat setempat mengenai kendala-kendala serta masalah yang dihadapinya untuk mencari data dan informasi

mengenai Peran Dinas Peternakan Dalam Pengendalian dan Pengawasan terhadap Kesehatan Hewan di Pasar Palakka Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Peternakan dan Kesehatan Hewan”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, yang dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor lain non-hukum.²⁰

Dalam penelitian ini corak penelitian sosiologisnya menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu berusaha untuk mengerti makna dari berbagai peristiwa dan interaksi dalam masyarakat yang memiliki ruang lingkup yang luas, bukan hanya sekedar menampung salah satu aspek dari realita yang hidup di masyarakat, akan tetapi berperan untuk mempelajari sistem hukum secara keseluruhan yang bekerja dalam masyarakat tersebut.

Pendekatan fenomenologis ini diperlukan untuk rangka mempertimbangkan berbagai keputusan dan garis pedoman dalam menentukan dan menguraikan norma-norma hukum yang mampu bekerja dalam masyarakat, sehingga tidak hanya menjelaskan norma-norma itu saja, melainkan mampu juga menjelaskan manusia dalam situasinya yang khusus.²¹

Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam segi normatif dengan yang terjadi secara empiris di lapangan.

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

²¹Amiruddin, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Cat. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 27.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah kantor Dinas Peternakan Bone yang terletak di jalan M.H Thamrin, Manurunge, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92712.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas peternakan Bone ialah waktu yang dirasa untuk melakukan penelitian bisa lebih efektif dan efisien, disamping itu juga lokasi penelitian dari kampus lebih dekat dan lebih mudah untuk dijangkau oleh peneliti, serta lebih menarik untuk diteliti.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Hanya sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²²

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.²³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian baik melalui individu atau kelompok. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari salah satu pegawai dinas perhubungan yang mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.²⁴ Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh

²²Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Ed I (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 9.

²³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), h. 121.

²⁴Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), h. 122.

penulis atau peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari bahan pustaka atau buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.²⁵

5. Instrument Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrument penelitian dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsure terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data-data instrument penelitian yang dimaksud, yaitu:

a. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber yaitu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone Serta perangkat-perangkat di dalam kantor Dinas Peternakan Bone yang dianggap penting serta yang ada di lapangan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁶

b. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis.²⁷ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a). Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta.2013), h 172.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²⁷Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Cet. I; Semarang: PT. Citra Aditya Bakti. 2009), h. 69.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti. Wawancara akan difokuskan pada beberapa objek diantaranya yaitu Kepala Dinas Peternakan Bone dan masyarakat yang menjadi faktor permasalahan yang akan diteliti.²⁸

b). Observasi, merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, termasuk di dalamnya kejadiannya atau peristiwa-peristiwa yang erat hubungannya dengan penelitian.²⁹

7. Teknik Analisi Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.³⁰ Penelitian kualitatif sering disebut teori lensa atau teori perspektif.³¹

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ,(Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 126.

²⁹Hamdan Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996);h.100.

³⁰ Syarifuddin Nawi, *Penelitian hukum*. 2011, h. 53.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* ,(Cet. III; Yogyakarta: Alfabeta, 2012), h. 295.

Dalam menganalisis data, teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif* yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat khusus untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat umum.
- b. *Deduktif* yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat umum. Yang selanjutnya dianalisis untuk diterapkan ke hal yang bersifat khusus.³²

³²Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (cet I, Pers Luqman Al-Hakin Watampone, 2015), h. 30.